

RENCANA KERJA

TAHUN 2024



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO**

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN SIDOARJO

DAFTAR ISI

| | | |
|------------|--|-------|
| Daftar Isi | | i |
| BAB. I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 3 |
| 1.2 | Landasan Hukum | 3-7 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 7-8 |
| | Maksud | |
| | Tujuan | |
| 1.4 | Sistimatika Penulisan | 8-9 |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 10 |
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu. | 10-20 |
| | 2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan | |
| | 2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu | |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 21 |
| 2.3 | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 21-22 |
| 2.4 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 22 |
| 2.5 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 23-31 |
| BAB III. | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 32 |
| 3.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 32 |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 32-33 |
| BAB IV. | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 34-53 |
| BAB V | PENUTUP | 54 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Renja merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran Renstra Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada RKPD Kabupaten Sidoarjo. Renja Dinas Tenaga Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam satu tahun anggaran.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor Ketenagakerjaan dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 05 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan selama tahun 2024.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi-misi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 –2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2020 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024.
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
36. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
38. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
39. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
40. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
41. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
42. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
43. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);



45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit;
47. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
48. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
49. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
51. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-17/MEN/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
53. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
54. SE Bupati Nomor : 050/5793/438.6.1/2023 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

a. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penetapan RENJA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor tenaga kerja tahun berjalan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi yang termuat dalam RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Kebijakan Umum, Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara



dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kompetensi/ ketrampilan tenaga kerja.
- b. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

b. Sistematika Penulisan.

Penulisan Rencana Kerja ini dengan sistematika meliputi :Daftar Isi
Daftar Tabel

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinyan atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Bidang Ketenagakerjaan

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Sidoarjo.

Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2022

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET TAHUN 2022 | REALISASI TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja | Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja | 57 % | 69,39% | 121,7% |
| 2. | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan | 64% | 66,93% | 104,6% |
| 3. | Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif | Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) | 22% | 24,75% | 112,5% |



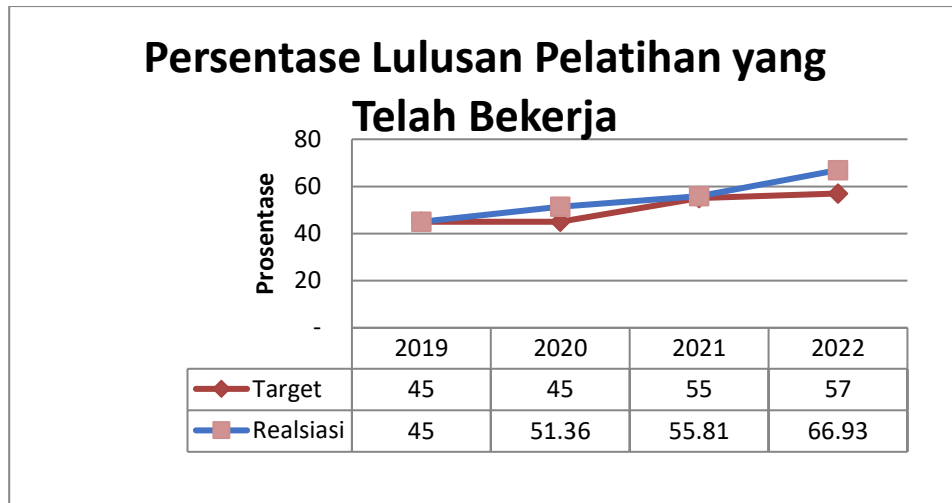
Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk mendukung target tujuan tersebut diatas ditetapkan **sasaran urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan** dengan target kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2022 | | |
|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| | TARGET | REALISASI | % | TARGET *) | TARGET *) | TARGET *) | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja | 45 | 45 | 100 | 45 | 51,36 | 114,13 | 55 | 55,81 | 101,47 | 57 | 66,93 | 121,7 |



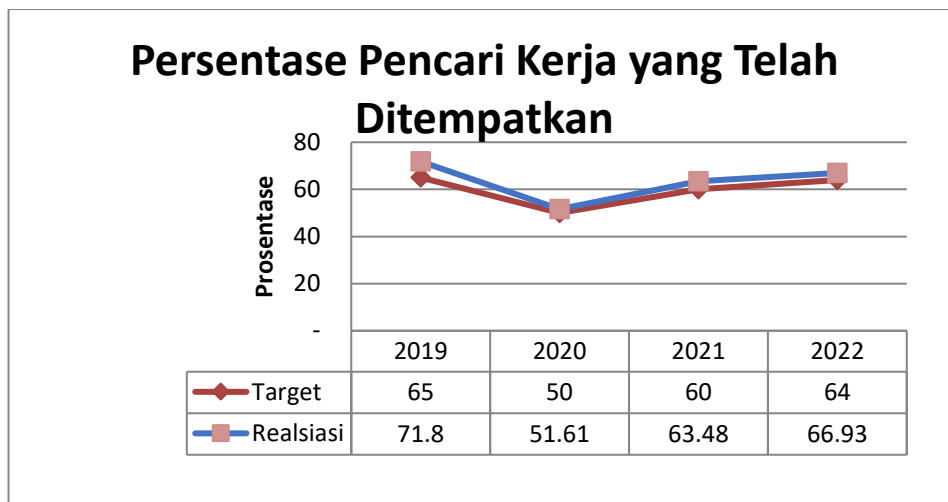
Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan lulusan pelatihan yang telah bekerja. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penetrasi peserta pelatihan yang bekerja menurun, dari target masa pandemi sebesar 45% tercapai 51,36% atau 265 orang peserta pelatihan telah bekerja dari 516 total peserta pelatihan dan pada tahun 2021 terdapat upaya peningkatan peserta pelatihan dan monitoring peserta pelatihan yang bekerja dan tercapai 55,81% atau 480 peserta pelatihan yang telah bekerja dari 840 peserta pelatihan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yg sangat signifikan untuk peserta pelatihan yang lulus pelatihan dan telah bekerja dari 1016 peserta pelatihan 705 yang telah bekerja atau setara dengan capaian 69,39%



Sasaran 2 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2022 | | |
|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | TAR GET | REAL ISASI | % | TAR GET | REAL ISASI | % | TAR GET | REAL ISASI | % | TAR GET | REAL ISASI | % |
| Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | 65 | 71,8 | 110,46 | 50 | 51,61 | 103,22 | 60 | 63,48 | 105,8 | 64 | 66,93 | 104,6 |



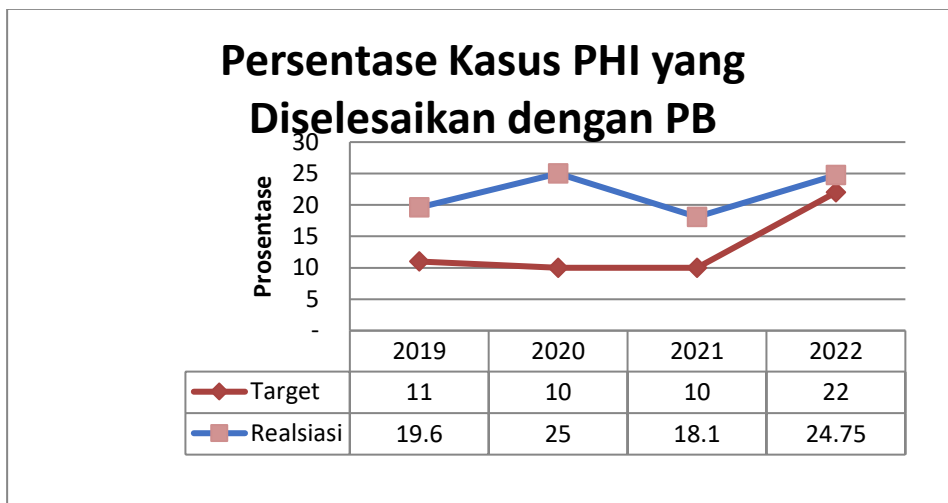
Pada grafik di atas, dapat dijelaskan tahun 2020 terjadi penurunan tren realisasi dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan beberapa perusahaan tidak menerima karyawan bahkan beberapa perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Hal ini dibuktikan tingginya PHK di Kabupaten Sidoarjo. Namun realisasi telah mencapai dari target masa pandemi Covid yang telah ditetapkan sebesar 50% dengan realisasi 51,61%. Pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 63,27 persen yaitu 9.422 orang ditempatkan dari 14.891 orang pencari kerja. Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan di tahun 2022 sebanyak 30.856 orang dari seluruh pencari kerja yang ada sebanyak 46.099 orang, sehingga persentase pencari kerja yang telah ditempatkan di tahun 2022 tercapai 66,93 % dari target 64 % atau capaian 107 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 63,48 % maka terdapat peningkatan sekitar 3,45 %.



Sasaran 3: Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2022 | | |
|---|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-------|
| | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) | 11 | 19,6 | 178,18 | 10 | 25 | 250 | 10 | 18,1 | 181 | 22 | 24,75 | 112,5 |



Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari tahun ke tahun. Perjanjian Bersama (PB) merupakan salah satu jalan keluar yang ditempuh dalam hubungan industrial agar hubungan kerja dapat berjalan harmonis antara pihak pengusaha / perusahaan dan pekerja. Sebagaimana data penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama selama Tahun 2022 dan sesuai ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004. Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dilaporkan di tahun 2022 sebanyak 101 kasus dan yang telah terselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 25 kasus, sehingga persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) di tahun 2022 tercapai 24,75.% dari target 22 % atau capaian 112,5 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 18,1 % maka terdapat peningkatan angka 6,65 atau sekitar 36,74 %.



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dari data dan grafik diatas dapat dianalisis bahwa pada sasaran yang diampu oleh Dinas Kerja Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan capaian kinerja yang signifikan hal ini dikarenakan :

1. Skema Pelatihan yang disesuaikan dengan metode uji kompetensi
2. Jenis pelatihan yang sesuai dengan dunia usaha dan industri
3. Pelaksanaan kegiatan Job Matching, Job Fair, Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ), dan Informasi Pasar Kerja sesuai kebutuhan Angkatan kerja
4. terselesainya perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama

Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1:

Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja di tahun 2022 tercapai 69,39% dari target 57% atau capaian 121,7%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 55,81% maka terdapat peningkatan angka 13,58.

Adapun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2022 dan lulusannya telah mendapatkan pekerjaan, sebagaimana tabel berikut :

| NO | URAIAN KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI | TEMPAT | PESERTA | PESERTA LULUS UJK | TIDAK LULUS UJK | PESERTA YANG SUDAH BEKERJA / WIRAUUSAHA |
|----|---|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|---|
| 1 | Pelatihan Menjahit Lanjutan | Kecamatan Tulangan | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 2 | Pelatihan Menjahit Lanjutan | Kecamatan Krembung | 16 | 16 | - | 16 |
| 3 | Pelatihan Menjahit Lanjutan | Kecamatan Prambon | 16 | 15 | 1 | 15 |
| 4 | Pelatihan Menjahit Lanjutan | Kecamatan Wonoayu | 16 | 11 | 5 | 13 |
| 5 | Pelatihan Menjahit Dasar | Kecamatan Taman /LPK.MODES PEMBINA | 16 | - | - | 16 |
| 6 | Pelatihan Menjahit Lanjutan | Kecamatan Gedangan | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 7 | Pelatihan Menjahit Lanjutan | Kecamatan Gedangan | 16 | 10 | 6 | 8 |
| 8 | Pelatihan Pastry | Kecamatan Tulangan | 20 | 20 | - | 18 |
| 9 | Pelatihan Pastry | Kecamatan Krembung | 20 | 20 | - | 15 |
| 10 | Pelatihan Pastry | Kecamatan Prambon | 20 | 20 | - | 13 |
| 11 | Pelatihan Pastry | Kecamatan Wonoayu | 20 | 19 | 1 | 17 |
| 12 | Pelatihan Pastry | Kecamatan Gedangan | 20 | 20 | - | 13 |
| 13 | Pelatihan Pastry | Keamatan Waru | 20 | 20 | - | 13 |
| 14 | Pelatihan Pastry | Kecamatan Sedati | 20 | 20 | - | 8 |
| 15 | Pelatihan Pastry | Kecamatan Sidoarjo (SMPN 4 Sidoarjo) | 20 | 20 | - | - |
| 16 | Pelatihan Spa Refleksiologi | Kecamatan Tulangan | 20 | 20 | - | 12 |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|----|----|---|----|
| 17 | Pelatihan Spa Refleksiologi | Kecamatan Krembung | 20 | 20 | - | 13 |
| 18 | Pelatihan Spa Refleksiologi | Kecamatan Prambon | 20 | 20 | - | 7 |
| 19 | Pelatihan Spa Refleksiologi | Kecamatan Wonoayu | 20 | 20 | - | 13 |
| 20 | Pelatihan Pastry | Desa Balongdowo Kec. Candi | 20 | 20 | - | 20 |
| 21 | Pelatihan Pastry | Desa Balongdowo Kec. Candi | 20 | 20 | - | 20 |
| 22 | Pelatihan Pastry | Desa Kalidawir Kec. Tanggulangin | 20 | 20 | - | 20 |
| 23 | Pelatihan Pastry | Desa Ngaban Kec. Tanggulangin | 20 | 20 | - | 20 |
| 24 | Pelatihan Pastry | Desa Ngaban Kec. Tanggulangin | 20 | 20 | - | 20 |
| 25 | Pelatihan Pastry | Desa Kedungrejo Kec. Jabon | 20 | 20 | - | 20 |
| 26 | Pelatihan Barista | Kecamatan Candi | 16 | 16 | - | 16 |
| 27 | Pelatihan Barista | Kecamatan Candi | 16 | 16 | - | 16 |
| 28 | Pelatihan Barista | Desa Kalidawir Kec. Tanggulangin | 16 | 16 | - | 16 |
| 29 | Pelatihan Barista | Desa Kedungbanteng Kec. Tanggulangin | 16 | 16 | - | 16 |
| 30 | Pelatihan Barista | Desa Kedungbanteng Kec. Tanggulangin | 16 | 16 | - | 16 |
| 31 | Pelatihan Barista | Desa Kedungrejo Kec. Jabon | 16 | 16 | - | 16 |
| 32 | Pelatihan Tata Rias Salon (MUA) | Kecamatan Jabon | 16 | 16 | - | 11 |
| 33 | Pelatihan Tata Rias Salon (MUA) | Kecamatan Jabon | 16 | 16 | - | 10 |
| 34 | Pelatihan Tata Rias Salon (MUA) | Kecamatan Gedangan | 16 | 16 | - | 9 |
| 35 | Pelatihan Tata Rias Salon (MUA) | Kecamatan Waru | 16 | 16 | - | 7 |
| 36 | Pelatihan Tata Rias Salon (MUA) | Bali Desa Gelang Kec. Tulangan | 16 | 16 | - | 6 |
| 37 | Pelatihan Tata Rias Salon (MUA) | Balai Desa Rejeni Kec. Krembung | 16 | 16 | - | 5 |
| 38 | Pelatihan Tata Rias Salon (MUA) | Balai Desa Gedangrowo Kec. Prambon | 16 | 16 | - | 9 |
| 39 | Pelatihan Barista | Kecamatan Gedangan | 16 | 16 | - | 8 |
| 40 | Pelatihan Barista | Balai Desa Pabean Kec. Sedati | 16 | 16 | - | 14 |
| 41 | Pelatihan Barista | SMAN 4 Sidoarjo | 16 | 16 | - | - |
| 42 | Pelatihan Barista | Kecamatan Wonoayu | 16 | 16 | - | 10 |
| 43 | Pelatihan Barista | Kecamatan Wonoayu | 16 | 16 | - | 6 |
| 44 | Pelatihan Barista | Kecamatan Wonoayu | 16 | 16 | - | - |
| 45 | Pelatihan Barista | Balai Desa Dukuhsari Kec. Jabon | 16 | 16 | - | 5 |
| 46 | Pelatihan Barista | Kelurahan Juwet Kenongo Kec. Porong | 16 | 16 | - | 7 |
| 47 | Pelatihan Barista | Kecamatan Tanggulangin | 16 | 16 | - | 4 |
| 48 | Pelatihan Tata Rias Pengantin | Balai Desa Ketimang Kec. Wonoayu | 16 | 16 | - | 11 |
| 49 | Pelatihan Tata Rias Pengantin | Balai Desa Ketimang Kec. Wonoayu | 16 | 16 | - | 12 |
| 50 | Pelatihan Desain Grafis Junior | Kecamatan Waru | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 51 | Pelatihan Desain Grafis Junior | SMKN 1 Jabon | 16 | 8 | 8 | 5 |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|----|---|------------|
| 52 | Pelatihan Menjahit Upper Sepatu | Kecamatan Wonoayu | 16 | 16 | - | 1 |
| 53 | Pelatihan Menjahit Upper Sepatu | Balai Desa Semambung Kec. Wonoayu | 16 | 15 | 1 | 8 |
| 54 | Pelatihan Las Listrik | | 0 | - | - | - |
| 55 | Pelatihan Las Listrik | | 0 | - | - | - |
| 56 | Pelatihan Las Listrik | | 0 | - | - | - |
| 57 | Pelatihan Las Listrik | | 0 | - | - | - |
| 58 | Pelatihan Las Listrik | | 0 | - | - | - |
| 59 | Pelatihan Las Listrik | | 0 | - | - | - |
| 60 | Pelatihan Pendingin AC | | 0 | - | - | - |
| 61 | Pelatihan Pendingin AC | | 0 | - | - | - |
| 62 | Pelatihan Pendingin AC | | 0 | - | - | - |
| 63 | Pelatihan Pendingin AC | | 0 | - | - | - |
| 64 | Pelatihan Pendingin AC | | 0 | - | - | - |
| 65 | Pelatihan Pendingin AC | | 0 | - | - | - |
| 66 | Pelatihan Menjahit | Kecamatan Candi | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 67 | Pelatihan Menjahit | Kecamatan Candi | 16 | 14 | 2 | 16 |
| 68 | Pelatihan Menjahit | Kecamatan Tanggulangin | 16 | 14 | 2 | 16 |
| 69 | Pelatihan Menjahit | Kecamatan Tanggulangin | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 70 | Pelatihan Menjahit | Kecamatan Jabon | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 71 | Pelatihan Menjahit | Kecamatan Jabon | 16 | 14 | 2 | 13 |
| | | TOTAL PESERTA YANG DILATIH | 1016 | | | |
| | | TOTAL PESERTA BEKERJA | | | | 705 |

Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator. Indikator Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja adalah perhitungan lulusan pelatihan yang telah bekerja setiap tahunnya. Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja dapat direalisasi sebesar 69,39% dengan jumlah peserta lulus pelatihan yang telah bekerja sebesar 705 orang. Bila dibandingkan dengan target sebesar 57% terdapat peningkatan sebesar 12,39% dari target atau setara 87 orang.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Jenis Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.
2. Sinergitas pemerintah, apindo, akademisi dan BPVP melalui pembentukan skill Development Centre (SDC)



Sasaran 2

Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan di tahun 2022 sebanyak 30.856 orang dari seluruh pencari kerja yang ada sebanyak 46.099 orang, sehingga persentase pencari kerja yang telah ditempatkan di tahun 2022 tercapai 66,93% dari target 64% atau capaian 104,6%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 64% terdapat peningkatan sebesar 2,93% dari target atau setara 1.350 pencari kerja. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik seperti BKK, job matching dan job fair, dan kegiatan yang mendukung program prioritas Bupati terpilih yaitu 100.000 lapangan kerja. Selain itu telah memberikan pelayanan dan fasilitasi untuk mendukung penempatan tenaga kerja baik secara anggaran maupun non anggaran dengan maksimal. Upaya yang dilakukan agar semakin banyak pencari kerja yang ditempatkan, yaitu :

1. Optimalisasi fungsi perantara kerja dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan, job matching, job fair, konsultasi karir untuk mengetahui minat dan bakat disesuaikan dengan lowongan yang ada
2. Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
3. Mendorong pencari kerja yang telah dilatih untuk berwirausaha

Sasaran 3

Perjanjian Bersama (PB) merupakan jalan keluar yang ditempuh dalam hubungan industrial agar hubungan kerja dapat berjalan harmonis antara pihak pengusaha / perusahaan dan pekerja. Sebagaimana penyelesaian Hubungan Industrial harus diselesaikan maksimal 30 hari kerja terhitung dari pelimpahan berkas penyelesaian hubungan industrial ke Mediator Hubungan Industrial.

Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dilaporkan di tahun 2022 sebanyak 101 kasus dan yang telah terselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 25 kasus, sehingga persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) di tahun 2022 tercapai 24,75% dari target 22% atau capaian 112,5%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 18,1% maka terdapat peningkatan angka 6,65 atau sekitar 36,74%. Peningkatan dimaksud disebabkan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial pihak-pihak lebih memilih melalui PB oleh Mediator Hubungan Industrial untuk upaya hukum lebih lanjut..



Upaya yang telah dilakukan:

1. Fasilitasi secara maksimal dalam sidang mediasi sehingga pendirian para pihak dapat dipertemukan melalui kesepakatan
2. Memperjelas kehadiran pihak-pihak yang bersengketa, agar proses mediasi fokus pada penyelesaian perkara

Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022

| SASARAN 1 : Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---------|----------------------|
| PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Program/Kegiatan | Target 2022 | Realisasi 2022 | Capaian | Tingkat Keberhasilan |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | a. persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perizinan | 43% | 43% | 100% | Sangat Berhasil |
| | b. persentase lembaga pelatihan lembaga kerja yang terakreditasi | 20% | 20% | 100% | Sangat Berhasil |
| | c. persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi | 82% | 78,31% | 95,5% | Berhasil |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase peserta pelatihan yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pelatihan | 82% | 82% | 100% | Sangat Berhasil |
| SASARAN 2 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | | | | | |
| PROGRAM | Indikator PROGRAM | Target 2022 | Realisasi 2022 | Capaian | Tingkat Keberhasilan |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja | a. Persentase Dokumen RTK yang tersusun | 100% | 100% | 105,8% | Sangat Berhasil |
| | b. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTK | 100% | 100% | 100% | Sangat Berhasil |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | 64% | 64% | 100% | Sangat Berhasil |
| Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Perentase transmigrasi yang diberangkatkan | 100% | 49% | 49% | Kurang |
| SASARAN 3 : Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif | | | | | |
| PROGRAM | Indikator PROGRAM | Target 2022 | Realisasi 2022 | Capaian | Tingkat Keberhasilan |
| Program Hubungan Industrial | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | 22% | 24,75% | 112,5% | Sangat Berhasil |
| | Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit | 25% | 33,95% | 135,8% | Sangat Berhasil |



Keterangan :

| No. | % CAPAIAN | KATEGORI |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat berhasil |
| 2 | 90% s.d kurang dari 100% | Berhasil |
| 3 | 75% s.d kurang dari 90% | Cukup |
| 4 | Kurang dari 75% | Kurang |

Laporan Realisasi Anggaran

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--|---------------|---------------|-------------|
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 10.700.000 | 9.215.000 | 86,12% |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 9.467.466.767 | 5.983.106.540 | 63,20% |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 1.477.022.353 | 1.389.722.400 | 94,10% |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.098.204.972 | 1.076.273.050 | 98% |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 29.751.400 | 14.600.0003 | 49,07% |

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|-----|---|---|---------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja | Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja | 57% | 69,39% | 121,7% | 9.467.466.767 | 5.983.106.540 | 63,20% |
| 2. | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan | 64% | 66,93% | 104,6% | 1.477.022.353 | 1.389.722.400 | 94% |
| 3. | Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif | Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) | 22% | 24,75% | 112,5% | 1.098.204.972 | 1.076.273.050 | 98% |

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | % CAPAIAN KINERJA | % CAPAIAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah | Persentase lulusan pelatihan yang telah | 121,7% | 63,2% | 36,8% |



| | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|-------|
| | bekerja | bekerja | | | |
| 2. | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan | 104,6% | 93,15% | 6,85% |
| 3. | Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif | Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) | 112,5% | 98% | 2% |



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang Ketenagakerjaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Tenaga Kerja dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada urusan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka secara umum, pengangguran muda (20-34 tahun) dan pengangguran terdidik (SMA-SMK) khususnya;
2. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial;
3. Lemahnya perlindungan terhadap pekerja/buruh
4. Tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dalam menghadapi



persaingan global

5. Penerapan dan penegakan hukum dalam konflik hubungan industrial belum optimal;
6. Rendahnya pemanfaatan perangkat teknologi informasi sebagai sarana pencarian peluang kesempatan kerja;
7. Memunculkan kebutuhan jabatan-jabatan baru yang belum pernah ada sebelumnya karena dinamika revolusi industri 4,0 dan 5,0;
8. Pengelolaan data dasar ketenagakerjaan yang terpadu;
9. Jumlah dan kualifikasi SDM aparatur fungsional;
10. Sarana Prasarana yang belum mengakomodasi kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja;

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian kinerja pelayanan yang dirinci sebagai berikut:

11. Masih rendahnya efisiensi terhadap operasionalitas teknis administrasi perkantoran;
12. Masih rendahnya kinerja penyelesaian kasus norma ketenagakerjaan;
13. Pembukaan akses informasi yang belum optimal diserap oleh masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Tenaga Kerja telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga



Kerja.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain merencanakan kegiatan dengan mekanisme *Top Down*, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan perencanaan pembangunan secara *Bottom Up* melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Maupun Tingkat OPD. Hal ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo tentang pembangunan di daerahnya.

**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo**

| No. | Tgl Usulan | PENGUSUL | Profil | URUSAN | USULAN | PERMASALAHAN | ALAMAT LOKASI |
|-----|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | 24/01/2023 | H. MASDUQI, SE | Kepala Desa Modong | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Meningkatkan SDM | Desa Modong, Kab. Sidoarjo |
| 2. | 24/01/2023 | M. Husin | Kepala Desa Kenongo | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Pelatihan Ketenagakerjaan untuk warga yang tidak mempunyai pekerjaan / pengangguran | Desa Kenongo , Kab. Sidoarjo |
| 3. | 24/01/2023 | Asfar Imron | Kepala Desa Medalem | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Warga yg belum bekerja membutuhkan ketrampilan dan pelatihan agar dapat memperoleh pekerjaan | Desa Medalem, Kab. Sidoarjo |
| 4. | 24/01/2023 | Umi Hayati | Kepala Desa Kendalsewu | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Perlunya pelatihan keterampilan (menjahit) dan lain"nya bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan | Desa Kendalsewu, Kab. Sidoarjo |
| 5. | 19-01-2023 | Budi Utomo, S.Sos | Kepala DEsa Ngaban | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | banyaknya pencari kerja /pengangguran sehingga dibutuhkan pelatihan menjahit guna meningkatkan ekonomi masyarakat | Desa Ngaban, Kab. Sidoarjo |
| 6. | 25-01-2023 | Muhammad Adenan | Kepala Desa Ganggangpanjang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | kurangnya lapangan pekerjaan di industri perlu adanya Pelatihan Teknisi Telepon Selular Perangkat Keras sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat | Desa Ganggangpanjang Kec Tanggulangin, Kab. Sidoarjo |
| 7. | 25-01-2023 | Muhammad Adenan | Kepala Desa Ganggangpanjang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | kurangnya lapangan pekerjaan di industri perlu adanya Pelatihan Menjahit bagi wanita sehingga bisa membuka lapangan | Desa Ganggangpanjang Kec Tanggulangin, Kab. Sidoarjo |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | pekerjaan baru bagi masyarakat | |
| 8. | 20-01-2023 | H. SUKIMIN, SE | Kepala Desa Kramatjegu | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Kurang tersedianya lapangan pekerjaan menyebabkan sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, maka dari itu perlunya untuk diadakan pelatihan menjahit bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan | Balai Desa Kramatjegu, Kab. Sidoarjo |
| 9. | 20-01-2023 | H. SUKIMIN, SE | Kepala Desa Kramatjegu | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Kurang tersedianya lapangan pekerjaan menyebabkan sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, maka dari itu perlunya untuk diadakan pelatihan mesin pendingin/AC bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan (AC) | Balai Desa Kramatjegu, Kab. Sidoarjo |
| 10 | 25-01-2023 | ACHMAD SUBALI USMONO | Kepala DEsa Sadang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Mengembangkan potensi ekonomi dan masyarakat yang ada di Desa Sadang (MENJAHIT) | Desa Sadang Kecamatan Taaman , Kab. Sidoarjo |
| 11 | 20-01-2023 | SUWONO | Kepala Desa Suruh | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | KARENA BANYAK TERDAPAT PENGANGGURAN DI DESA SURUH | DESA SURUH, Kab. Sidoarjo |
| 12 | 23-01-2023 | MASRUKHAN, S.Pd,M.Pd.I. | Kepala Desa Sambungrejo | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | banyaknya pengangguran yang belum mempunyai keahlian/skill untuk bekerja/wirausaha | Balai Desa Sambungrejo, Kab. Sidoarjo |
| 13 | 24-01-2023 | MUKHAMMAD IKYANI | Kepala Desa Ngaresrejo | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Memberikan Keterampilan Kerja Kepada kelompok pemuda yang tidak bekerja | Desa Ngaresrejo, Kab. Sidoarjo |
| 14 | 25-01-2023 | AMIN MAHFUD | Kepala Desa Bangsri | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Banyaknya pengangguran yang tidak mempunyai skill/ keterampilan membutuhkan pelathan menjahit sehingga bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri maupun lingkungan. | Desa Bangsri, Kab. Sidoarjo |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| 15 | 23-01-2023 | LEBO | | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Perlu adanya Pelatihan Menjahit bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. | Lebo RT 08 RW 03, Kab. Sidoarjo |
| 16 | 24-01-2023 | YUNAN FARUK EFFENDI | Kepala Desa Sarirogo | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | warga desa usia produktif masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga dibutuhkan pelatihan untuk melatih skill/keterampilan agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri | Desa Sarirogo, Kab. Sidoarjo |
| 17 | 24-01-2023 | SUTRISNO | Kepala Desa Kwangsan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Untuk meningkatkan keahlian warga desa kwangsan dalam bidang menjahit maka dibutuhkan pelatihan menjahit dasar dan lanjutan | Kantor Balai Desa Kwangsan, Jl. Kwangsan Rt 001 Rw 001, Kab. Sidoarjo |
| 18 | 25-01-2023 | SUTRISNO | Kepala Desa Kwangsan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Untuk meningkatkan keahlian dan perekonomian warga desa kwangsan dalam bidang tata rias maka dibutuhkan pelatihan tata rias | Kantor Kepala Desa Kwangsan, Jl. Mangkurejo Rt 001 Rw 001, Kab. Sidoarjo |
| 19 | 25-01-2023 | SUTRISNO | Kepala Desa Kwangsan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Untuk meningkatkan keahlian dan perekonomian warga desa kwangsan dalam bidang servis kendaraan solar dan bensin maka dibutuhkan pelatihan servis kendaraan solar dan bensin | Kantor Kepala Desa Kwangsan, Kab. Sidoarjo |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | |
|----|------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| 20 | 25-01-2023 | SUTRISNO | Kepala Desa Kwangsan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Untuk meningkatkan keahlian dan perekonomian warga desa kwangsan dalam bidang potong rambut maka dibutuhkan pelatihan potong rambut | Kantor Balai Desa Kwangsan, Jl. MangkurejoRt 001 Rw 001, Kab. Sidoarjo |
| 21 | 20-01-2023 | Muhammad Ali ridho S.Pdi | Kepala Desa Prambon | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Kurangnya lapangan pekerjaan | Desa Prambon, Kab. Sidoarjo |
| 22 | 24-01-2023 | MAHFUD | Kepala Desa Cangkringturi | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Dibutuhkan Pelatihan Untuk Mengurangi Pengangguran | Desa Cangkringturi, Kab. Sidoarjo |
| 23 | 24-01-2023 | ANANG DARMAWAN,SE | Kepala Desa Bendotretrek | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Menyiapkan tenaga tenaga produktif untuk industri | Balai Desa Bendotretrek, Kab. Sidoarjo |
| 24 | 25-01-2023 | PETTY FITRI ANNA | Kepala DEsa Temu | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | banyaknya pemuda usia produktif yang belum bekerja | Desa Temu, Kab. Sidoarjo |
| 25 | 25-01-2023 | MUH. ROSOL, S.Pd | Kepala DEsa Pamotan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | perlu diadakan pelatihan untuk masyarakat demi meningkatkan perekonomian | pamotan, Kab. Sidoarjo |
| 26 | 26-01-2023 | MUHAMMAD SAIFULLOH, SSi, MPD | Kepala DEsa Glagaharum | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Kurangnya keterampilan atau keahlian masyarakat mengenai teknisi telepon selular perangkat keras/pelatihan perawatan AC residential/pelatihan menjahit. | Jl. Ranupatih No. 9 Glagah RT. 010 RW. 002 Glagaharum, Kab. Sidoarjo |
| 27 | | MOEDJIONO | | | Pelatihan untuk pemberdayaan perempuan | Kurangnya fasilitas dari pelatihan Bidang Ketrampilan Menjahit di butuhkan | Jalan Jendral Parman |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|
| 28 | 23-01-2023 | ASMINTO YANI | Kepala Desa Keboharan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Banyaknya Pengangguran, Kurangnya Kompetensi Masyarakat sebagai Bekal Membuka Usaha Sendiri ataupun Melamar Pekerjaan, Kurangnya Modal dan Alat Penunjang | Desa Keboharan, Kab. Sidoarjo |
| 29 | 23-01-2023 | Lujeng Wiyati, SE | Lurah Kemasan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Pelatihan Bagi Pemuda & Buruh | Kelurahan Kemasan (7°24'01.1"S 112°35'30.3"E) , Kab. Sidoarjo |
| 30 | 24-01-2023 | BAKRUDIN, S.S | Kepala Desa Terik | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | 1. semakin banyaknya pengguna telepon seluler 2. peluang jasa perbaikan di wilayah desa 3. tenaga kerja muda yang banyak 4. peluang lapangan kerja | Desa Terik, Kab. Sidoarjo |
| 31 | 25-01-2023 | ABU YAZID, SH | | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | pemberdayaan masyarakat demi menekan angka kemiskinan | Jalan Raya Ponokawan Nomor 1, Kab. Sidoarjo |
| 32 | 26-01-2023 | YATNOKO, SH | Kepala Desa Jaticalang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Masih adanya warga/masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran), sehingga membutuhkan pelatihan dan lapangan pekerjaan | Balai Desa Jaticalang, Kab. Sidoarjo |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | |
|----|------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 33 | 19-01-2023 | MUSA | Kepala Desa Keboguyang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Angka pengangguran di desa keboguyang termasuk tinggi pada warga pada masa umur produktif | Desa keboguyang, Kab. Sidoarjo |
| 34 | 20-01-2023 | MUDJITO | Kepala Desa Permisian | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | masih minimnya Pemuda yang bisa service Air Conditioner | Desa Permisian, Kab. Sidoarjo |
| 35 | 23-01-2021 | IKWAN WIDODO, SE | Kepala DEsa Dukuhsari | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Pelatihan membuat kue pastry. Banyak warga yang belum bisa membuat kue pastry, sehingga membutuhkan pelatihan membuat kue pastry agar masyarakat yang mengikuti pelatihan dapat menerapkannya guna mendapatkan penghasilan. | Desa Dukuhsari, Kab. Sidoarjo |
| 36 | 24-01-2023 | SAMSUL | Kepala DEsa Trompoasri | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Pelatihan Menjahit Komponen Pakaian , Untuk Meningkatkan ketrampilan warga desa trompoasri baik kader, maupun karangtanruna sehingga dapat membentuk UMKM baru | Desa Trompoasri, Kab. Sidoarjo |
| 37 | 24-01-2023 | SAMSUL | Kepala Desa Trompoasri | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Pelatihan Perawatan AC Residential, Untuk Meningkatkan ketrampilan warga desa trompoasri , maupun karangtanruna sehingga dapat membentuk UMKM baru | Desa trompoasri, Kab. Sidoarjo |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|
| 38 | 24-01-2023 | YUDIANTO | Kepala Desa Kedungcangk ring | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Pelatihan Teknisi Telepon. Banyaknya usia produktif (baru lulus sekolah) yang menjadi pengangguran karena tidak punya keahlian | Desa Kedungcangkring , Kab. Sidoarjo |
| 39 | 24-01-2023 | JAINURI | Kepala Desa Semambung | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Banyaknya pengangguran usia produktif (baru lulus sekolah) yang belum punya keahlian | Desa Semambung, Kab. Sidoarjo |
| 40 | 25-01-2023 | WAWAN HERMAWAN | Kepala Desa Kedungpandan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Pelatihan Menjahit. Meningkatkan SDM ibu-ibu. | Desa Kedungpandan, Kab. Sidoarjo |
| 41 | 25-01-2023 | MUKHAMAD | Kepala Desa Kupang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Masih banyak warga yang membutuhkan pekerjaan (Pelatihan Membatik) | Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Kab. Sidoarjo |
| 42 | 25-01-2023 | MUKHAMAD | Kepala Desa Kupang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Masih Banyak Warga yang belum bekerja (Pelatihan Kerajinan Tangan) | Desa Kupang, kecamatan Jabon, kabupaten Sidoarjo, Kab. Sidoarjo |
| 43 | 25-01-2023 | H. KHOIRUTH THOLAB, S.SOS | Kepala DEsa Jemirahan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga dan remaja putri dalam membuat pakaian | Desa Jemirahan, Kab. Sidoarjo |
| 44 | | MUKHAMAD | Kepala Desa Kupang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Masih banyak pemuda yang belum bekerja | Desa Kupang, kecamatan Jabon, kabupaten Sidoarjo, Kab. Sidoarjo |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| 45 | | MUKHAMAD | Kepala Desa Kupang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Masih banyak pemuda yang belum bekerja | Desa Kupang, kecamatan Jabon, kabupaten Sidoarjo, Kab. Sidoarjo |
| 46 | 24-01-2023 | QOYYIMAH | Kepala Desa jambangan | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Pelatihan menjahit bagi perempuan | Balai Desa Jambangan, Kab. Sidoarjo |
| 47 | 25-01-2023 | ALI NASIKIN, ST | Kepala Desa Sidokerto | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Mesin Pencacah Sampah untuk mengurangi volume sampah dan mengolah sampah organik menjadi komposter | TPST Sido Resik Desa Sidokerto, Kab. Sidoarjo |
| 48 | 24-01-2023 | FERRY | Kepala Desa Wonokupang | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | kurangnya lahan pekerjaan bagi pemuda | Wonokupang, Kab. Sidoarjo |
| 49 | 24-01-2023 | SA'I | Kepala Desa Plumpung | Dinas Tenaga Kerja | Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan | Kepala Desa Kupang | Jalan Kenanga No. 16 Dusun Plumpung RT. 007 RW. 001, Kab. Sidoarjo |



BAB III

TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024dimana terdapat 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, diantaranya :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

3.1.2 Telaah Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Strategis mengacu visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk menyelaraskan maka perlu menerjemahkan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Maka sesuai dengan Tupoksi Dinas



Tenaga Kerja berikut Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja:

“ Meningkatkan Perumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing “

Penyelenggaraan pelayanan tenaga kerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang berfungsi memfasilitasi kegiatan-kegiatan ketanagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Dinas Tenaga Kerja dimasa yang akan datang. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Tenaga Kerja selama lima tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja wajib mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Dinas Tenaga kerja harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas. Berikut tujuan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

“ Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka “

Setelah menetapkan tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Dinas Tenaga Kerja menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

- a. Meningkatnya kompetensi/ ketrampilan tenaga kerja.
- b. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan).



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|---|---|--|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 2 | 7 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Aparatur PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SKM | Sidoarjo | 88 persen | 4 Laporan | 96,6 | 180,000,000 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 6,942,552,524 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | SAKIP | Sidoarjo | 88 persen | 33 Orang/bulan | A | 6,933,322,524 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | SAKIP | Sidoarjo | 88 persen | 1 Laporan | A | 7,490,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|---|---|--|-------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------------------------|
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | SAKIP | Sidoarjo | 88 persen | 6 Laporan | A | 1,740,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | 13,483,301 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.03 | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Nilai RB | Sidoarjo | 88 persen | 1 Dokumen | 34,29 | 13,483,301 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 776,237,648 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Nilai SKM dan IPP | Sidoarjo | 88 persen | 663 paket | 96,6 dan 4,3 | 11,168,423 | Pajak Daerah |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|--|-------------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Nilai SKM dan IPP | Sidoarjo | 88 persen | 1545 Paket | 96,6 dan 4,3 | 71,940,924 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Nilai SKM dan IPP | Sidoarjo | 88 persen | 40100 Paket | 96,6 dan 4,3 | 225,850,000 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Nilai SKM dan IPP | Sidoarjo | 88 persen | 84376Paket | 96,6 dan 4,3 | 17,300,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Nilai SKM dan IPP | Sidoarjo | 88 persen | 5 Dokumen | 96,6 dan 4,3 | 6,120,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----|---|--|--|---|----------|-----------|--------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai SKM dan IPP | Sidoarjo | 88 persen | 4Laporan | 96,6 dan 4,3 | 30,375,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai SKM dan IPP | Sidoarjo | 88 persen | 4 Laporan | 96,6 dan 4,3 | 400,000,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 289,398,480 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tingkat Kepuasan Aparatur PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Sidoarjo | 88 persen | 1 Unit | 60 persen | 289,398,480 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 1,352,908,481 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tingkat Kepuasan Aparatur PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKM | Sidoarjo | 88 persen | 4000 Laporan | 96,6 | 10,500,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tingkat Kepuasan Aparatur PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | SKM | Sidoarjo | 88 persen | 3 Laporan | 96,6 | 152,408,481 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tingkat Kepuasan Aparatur PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | SKM | Sidoarjo | 88 persen | 4 Laporan | 96,6 | 1,190,000,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 393,809,400 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tingkat Kepuasan Aparatur PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Nilai RB | Sidoarjo | 88 persen | 1 Unit | 34,29 | 40,000,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--|---|----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tingkat Kepuasan Aparatur PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Nilai RB | Sidoarjo | 88 persen | 16 Unit | 34,29 | 98,809,400 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Nilai RB | Sidoarjo | 88 persen | 20 unit | 34,29 | 111,000,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Nilai RB | Sidoarjo | 88 persen | 1464 m2 | 34,29 | 144,000,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 7 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | | | 157,015,000 | | |
| 2 | 7 | 2 | 2.01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | | | 157,015,000 | | |
| 2 | 7 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 55 persen | 1 Dokumen | 7 persen | 65,050,000 | Pajak Daerah |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|---|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---|
| 2 | 7 | 2 | 2.01 | 2 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun | Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 55 persen | 60 | 57 persen | 91,965,000 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 3 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | 10,123,929,716 | |
| 2 | 7 | 3 | 2.01 | 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | presentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi | Jumlah Lembaga pelatihan yang terakreditasi | Persentase Lulusan Pelatihan yang telah bekerja | Sidoarjo | 21 persen | 50 lembaga | 58 persen | 9,852,220,700 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dan Pajak Daerah |
| | | | | | | presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Persentase Lulusan Pelatihan yang telah bekerja | Sidoarjo | 83 persen | 716 Orang | 58 persen | | |
| | | | | | | Persentase instruktur yang bersertifikat Kompetensi | Jumlah instruktur yang Mendapat Pelatihan melalui bimtek Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Persentase Lulusan Pelatihan yang telah bekerja | Sidoarjo | 54 persen | 716 Orang | 58 persen | | |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|---|---|----------|-----------|------------|-----------|--------------------|---|
| | | | | | | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki Perijinan | JUmlah Lembaga pelatihan kerja yang memiliki perijinan pada tahun n | Persentase Lulusan Pelatihan yang telah bekerja | Sidoarjo | 44 persen | 5 lembaga | 58 persen | | |
| 2 | 7 | 3 | 2.02 | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | 135,394,066 | |
| 2 | 7 | 3 | 2.02 | 1 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase lembaga kerja yang terakreditasi | Persentase peserta pembinaan lembaga pelatihan kerja yang memahami materi pembinaan | Persentase Lulusan Pelatihan yang telah bekerja | Sidoarjo | 21 persen | 60 Lembaga | 58 persen | 135,394,066 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dan Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 3 | 2.05 | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 136,314,950 | |
| 2 | 7 | 3 | 2.05 | 1 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek produktivitas | Persentase Lulusan Pelatihan yang telah bekerja | Sidoarjo | 53 persen | 0 Dokumen | 58 persen | 136,303,950 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dan Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 4 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | | 803,921,469 | |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 117,825,000 | |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|--|---|----------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | 3 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 60 persen | 75 Orang | 61 persen | 64,400,000 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | 4 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 60 persen | 5 Orang | 61 persen | 18,150,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|--|--|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | 5 | Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 60 persen | 240 Orang | 61 persen | 35,275,000 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | | | | 575,906,469 | |
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | 1 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 60 Persen | 1 Dokumen | 61 persen | 44,750,000 | Pajak Daerah |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|--|--|--|---|----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | 3 | Job Fair/Bursa Kerja | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 60 Persen | 40rang | 61 persen | 531,156,469 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 4 | 2.04 | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 89,340,000 | | |
| 2 | 7 | 4 | 2.04 | 1 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | Jumlah PMI yang mendapatkab sosialisasi | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 60 persen | 150 Orang | 61 persen | 14,545,000 | Pajak Daerah |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|--|--|--|----------|-----------|----------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| 2 | 7 | 4 | 2.04 | 03 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 60 persen | 0 Orang | 61 persen | 37,400,000 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 4 | 2.05 | | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 20,850,000 | | |
| 2 | 7 | 4 | 2.05 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya | Jumlah Perusahaan pengguna TKA yang mendapatkan sosialisasi | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Sidoarjo | 60 persen | 50 perusahaan | 61 persen | 20,850,000 | Pajak Daerah |
| 2 | 7 | 5 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | | 1,262,784,705 | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 488,064,952 | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 2 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Jumlah perusahaan yang mendaftarkan perjanjian kerjasama | Persentase kasus perselisihan HUBungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama | Sidoarjo | 23 persen | 283 Perusahaan | 23 persen | 18,807,575 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|---|--|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama | Sidoarjo | 23 persen | 120 laporan | 23 persen | 469,257,377 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 774,719,753 | |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|---|---|----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------------|
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang di selesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 23 Persen | 80 Perkara | 23 Persen | 21,477,818 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit | Persentase kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang ditangani | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 25 Persen | 100 Persen | 3 lembaga | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 38 Persen | 58 persen | 38 persen | | |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|---|---|----------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang di selesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi penyelesaian PHI | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 23 Persen | 80 perkara | 23 Persen | 347,100,000 | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit | Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terlayani | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 25 Persen | 100 Persen | 25 persen | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 38 Persen | 160 kasus | 38 Persen | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 3 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang di selesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 23 Persen | 10 asosiasi dan serikat | 23 Persen | 35,037,830 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|---|---|----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit | Persentase organisasi pengusaha, SP/SB yang dicatatkan | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 25 Persen | 100 Persen | 25 persen | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 38 Persen | 174 | 38 Persen | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 4 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang di selesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 23 Persen | 1 Lembaga | 23 Persen | 329,225,000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit | Jumlah unsur-unsur yang ada di LKS Tripartit Kabupaten | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 25 Persen | 3 Lembaga | 25 persen | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 38 Persen | | 38 persen | | |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|--|---|---|---|----------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 5 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang di selesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Struktur Skala Upah | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 23 Persen | 100.000 Orang | 23 Persen | 41,879,105 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit | Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan sosial tenaga kerja | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 25 Persen | 34 orang | 25 persen | | | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Sidoarjo | 38 Persen | 58 Orang | 38 persen | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | 10,150,000 | | | |
| 3 | 32 | 3 | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | 10,150,000 | | | |
| 3 | 32 | 3 | 2.01 | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 10,150,000 | | | |



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|--|---|---|--|----------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 3 | 32 | 3 | 2.01 | 4 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0Persentase transmigran yang diberangkatkan | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatka | Sidoarjo | 100 persen | 2 Kepala Keluarga | 61 persen | 10,150,000 | Pajak Daerah |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | 22,490,305,724 | |



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja ini merupakan pedoman tertulis secara terinci yang meliputi seluruh program kerja tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mengacu kepada RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 yang didalamnya memuat Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ini akan dijabarkan dalam bentuk RKA - P Dinas Tenaga Kerja yang disusun setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan Perubahan Renja ini perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua Stakeholder dan mendapatkan dukungan yang optimal dalam tahapan implementasinya.

Sidoarjo, 13 Juni 2023

**KEPALA DINAS TENAGA
KERJAKABUPATEN
SIDOARJO**



ANUN AMALIA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197505131993112001